

BAB 4

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Analisis Pengaruh Beban Pajak Sebelum dan Setelah Berlakunya PP 51/2008 jo. PP 40/2009

4.1.1 Analisis deskriptif

Perusahaan Jasa Konstruksi yang terdaftar pada BEI dengan beban pajak tertinggi adalah ADHI yaitu dengan rata-rata beban pajak sebesar Rp. 16,930 Milyar. WIKA dan DGIK menyusul pada tempat kedua dan ketiga dengan rata-rata beban pajak berturut-turut sebesar Rp. 13,781 Milyar dan Rp 8,785 Milyar. Pola Pergerakan beban pajak WIKA hampir serupa dengan pola pergerakan beban pajak ADHI. Pergerakan beban pajak kedua perusahaan ini lebih fluktuatif dibandingkan dengan pergerakan beban pajak DGIK.

Sebelum diberlakukannya PP 51/2008 jo PP 40/2009, beban pajak DGIK bergerak pada kisaran negatif Rp. 4,215 Milyar sampai Rp.12,657 Milyar. Sementara, kisaran beban pajak setelah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah dari Rp. 8,075 Milyar sampai Rp. 12,985 Milyar. Beban pajak WIKA sebelum diberlakukannya PP 51/2008 jo PP 40/2009 bergerak pada kisaran negatif Rp. 1.258 Milyar sampai Rp.6.131 Milyar. Sedangkan, kisaran beban pajak setelah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah dari Nihil sampai Rp. 71,453 Milyar.

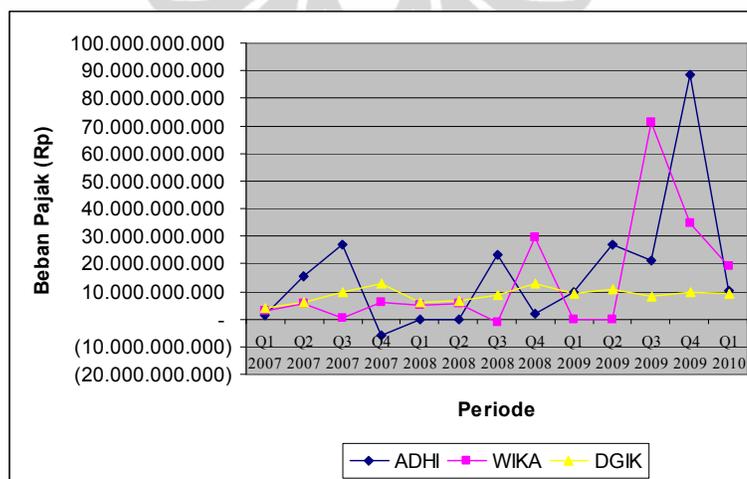
ADHI mengalami peningkatan beban pajak pada triwulan II dan III tahun 2007 dengan jumlah beban pajak sebesar Rp. 15,371 Milyar dan Rp. 27,212 Milyar sebelum akhirnya beban pajak ini disesuaikan pada akhir triwulan tahun 2007 menjadi Rp. (6,129 Milyar) karena penurunan laba kena pajak pada triwulan terakhir tahun 2007 sehingga besarnya beban pajak ADHI pun mengalami penurunan. Selama tahun 2008 sebelum diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009, beban pajak ADHI cenderung mengalami peningkatan dengan kisaran antara Nihil sampai Rp. 23,395 Milyar (triwulan III). Sedangkan kisaran beban

pajak setelah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah Rp. 9,802 Milyar sampai Rp. 88,360 Milyar.

Dari pola pergerakan ketiga perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa setelah berlakunya PP 51/2008 jo. PP 40/2009, Beban pajak perusahaan mengalami peningkatan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 secara signifikan mempengaruhi beban pajak perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan triwulan dapat dilihat bahwa ADHI dan WIKA baru menerapkan PP 51/2008 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2008 namun berlaku retrospektif sejak tanggal 1 Januari 2008 sejak triwulan ke-IV tahun 2008, sedangkan DGIK sudah langsung menerapkan PP ini pada triwulan ke-III tahun 2008.

Data beban pajak ADHI, WIKA dan DGIK yang berasal dari laporan keuangan triwulan perusahaan untuk triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 sampai dengan 31 Maret 2010 beserta rasio/perbandingan beban pajak terhadap laba sebelum pajaknya dapat dilihat pada lampiran 2. Pergerakan beban pajak perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada BEI berdasarkan data laporan keuangan triwulan yang diunduh dari situs Bursa Efek Indonesia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 sampai dengan 31 Maret 2010 dapat dilihat pada gambar 4.1.

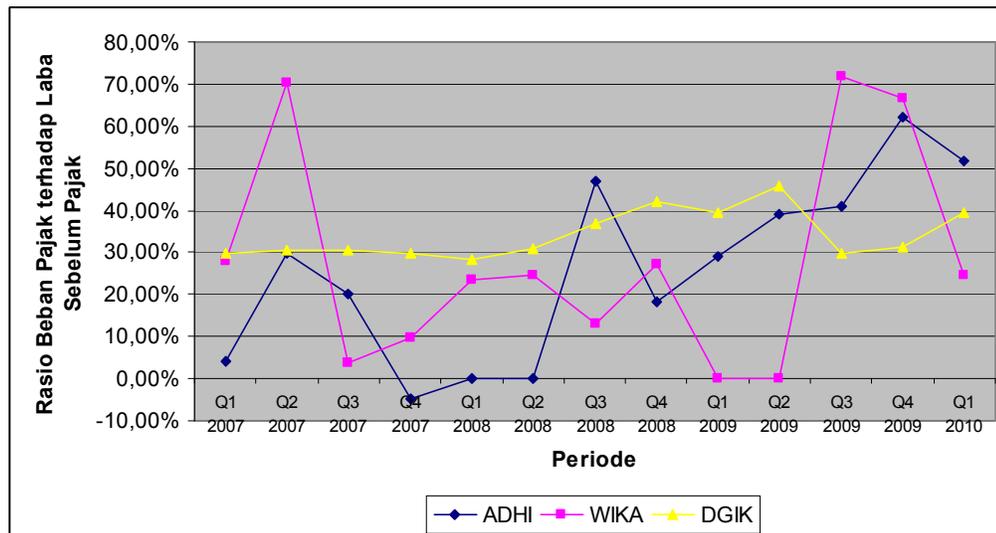
Gambar 4.1 Trend Beban Pajak Pada Perusahaan Jasa Konstruksi



Sumber: Laporan Keuangan Emiten Bursa Efek Indonesia

Adapun pergerakan dari beban pajak ADHI, WIKA, dan DGIK relatif terhadap laba sebelum pajaknya selama periode triwulan I tahun 2007 sampai triwulan I tahun 2010 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.2 Trend Rasio Beban Pajak terhadap Laba Sebelum Pajak Pada Perusahaan Jasa Konstruksi



Sumber: Laporan Keuangan Emiten Bursa Efek Indonesia

4.1.2 Analisis Regresi (Metode uji beda dua rata-rata /- t-test)

4.1.2.1 PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Hasil uji beda dua rata-rata dengan t-test yang menggunakan Microsoft Excel 2003 terhadap data beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- Berikut adalah hasil uji F yang digunakan untuk melihat kesamaan varians sebelum mengambil keputusan uji hipotesis:

Tabel 4.1 Hasil Uji F atas rasio beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	0,137199	0,402099454
<i>Variance</i>	0,037034	0,0243853

	Sebelum	Setelah
<i>Observations</i>	7	6
<i>df</i>	6	5
<i>F</i>	1,518683	
<i>P(F<=f) one-tail</i>	0,331634	
<i>F Critical one-tail</i>	3,404507	

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 1,5187, sedangkan nilai F tabel untuk derajat bebas (6,5) dengan taraf alpha =0,1 adalah sebesar 3,4045.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 karena $F_{hitung} < F_{tabel}$, yaitu dengan perolehan F_{hitung} (1,5187) lebih kecil dari F_{tabel} (3,4045). Dengan demikian, asumsi kesamaan ragam untuk kedua kelompok (sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/3009) dapat diterima atau dengan kata lain beban pajak sebelum dan setelah penerapan PP memiliki varians yang sama.

2. Berikut adalah hasil uji beda dua rata-rata dengan varian sama untuk analisis rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009:

Tabel 4.2 Hasil Uji T atas rasio beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo.

PP 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	0,137199	0,402099454
<i>Variance</i>	0,037034	0,0243853
<i>Observations</i>	7	6
<i>Pooled Variance</i>	0,031284	

	Sebelum	Setelah
<i>Hypothesized Mean Difference</i>		0
<i>df</i>		11
<i>t Stat</i>		-2,69198
<i>P(T<=t) one-tail</i>		0,010477
<i>t Critical one-tail</i>		1,795885
<i>P(T<=t) two-tail</i>		0,020955
<i>t Critical two-tail</i>		2,200985

Sumber: data diolah

Nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 2,6920 dengan nilai absolute dari t-hitung tersebut adalah 2,2010 dengan tingkat signifikan 0,0071 dan akan dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan taraf $\alpha=0,05$ dan $df=11$.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t.hitung (2,6920) lebih besar dari t tabel (2,2010). Dengan demikian, hipotesis H_0 yang menyatakan rata-rata beban pajak PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah sama besar tidak dapat diterima karena penambahan beban pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP tersebut signifikan.

4.1.2.2 PT Duta Graha Indah Tbk

Hasil uji beda dua rata-rata dengan t-test yang menggunakan Microsoft Excel 2003 terhadap data beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak PT Duta Graha Indah Tbk adalah sebagai berikut:

1. Berikut adalah hasil uji F yang digunakan untuk melihat kesamaan varians sebelum mengambil keputusan uji hipotesis:

Tabel 4.3 Hasil Uji F atas rasio beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak PT Duta Graha Indah Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	0,300213	0,37902
<i>Variance</i>	8,77E-05	0,003253
<i>Observations</i>	6	7
<i>df</i>	5	6
<i>F</i>	0,026951	
<i>P(F<=f) one-tail</i>	0,000546	
<i>F Critical one-tail</i>	0,293728	

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 0,0270, sedangkan nilai F tabel untuk derajat bebas (5,6) dengan taraf alpha =0,1 adalah sebesar 0,2937.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 karena $F_{hitung} < F_{tabel}$, yaitu dengan perolehan F_{hitung} (0,0270) lebih kecil dari F_{tabel} (0,2937). Dengan demikian asumsi kesamaan ragam untuk kedua kelompok (sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/3009) dapat diterima atau dengan kata lain beban pajak sebelum dan setelah penerapan PP memiliki varians yang sama.

2. Berikut adalah hasil uji beda dua rata-rata dengan varian berbeda untuk analisis rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak PT Duta Graha Indah Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009:

Tabel 4.4 Hasil Uji T atas rasio beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak PT Duta Graha Indah Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	0,300213	0,37902
<i>Variance</i>	8,77E-05	0,003253
<i>Observations</i>	6	7
<i>Pooled Variance</i>	0,001814	
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>df</i>	11	
<i>t Stat</i>	-3,32571	
<i>P(T<=t) one-tail</i>	0,003381	
<i>t Critical one-tail</i>	1,795885	
<i>P(T<=t) two-tail</i>	0,006762	
<i>t Critical two-tail</i>	2,200985	

Sumber: data diolah

Nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 3,3257 dengan nilai absolute dari t-hitung tersebut adalah 2,2010 dengan tingkat signifikan 0,0007 dan akan dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan taraf $\alpha=0,05$ dan $df=11$.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t.hitung (3,3257) lebih besar dari t tabel (2,2010). Dengan demikian, hipotesis H_0 yang menyatakan rata-rata beban pajak PT Duta Graha Indah Tbk sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah sama besar tidak dapat diterima karena penambahan beban pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP tersebut signifikan.

4.1.2.3 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Hasil uji beda dua rata-rata dengan t-test yang menggunakan Microsoft Excel 2003 terhadap data beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- Berikut adalah hasil uji F yang digunakan untuk melihat kesamaan varians sebelum mengambil keputusan uji hipotesis:

Tabel 4.5 Hasil Uji F atas rasio beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo.

	PP 40/2009	
	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	0,247522	0,317076
<i>Variance</i>	0,048291	0,097969
<i>Observations</i>	7	6
<i>df</i>	6	5
<i>F</i>	0,492918	
<i>P(F<=f) one-tail</i>	0,207131	
<i>F Critical one-tail</i>	0,321801	

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 0,4929, sedangkan nilai F tabel untuk derajat bebas (6,5) dengan taraf alpha =0,1 adalah sebesar 0,3218.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu dengan perolehan F_{hitung} (0,4929) lebih besar dari F_{tabel} (0,3218). Dengan demikian asumsi kesamaan ragam untuk kedua kelompok (sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/3009) tidak dapat diterima atau dengan kata lain beban pajak sebelum dan setelah penerapan PP memiliki varians yang berbeda.

2. Berikut adalah hasil uji beda dua rata-rata dengan varian berbeda untuk analisis rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009:

Tabel 4.6 Hasil Uji T atas rasio beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	0,247522	0,317076
<i>Variance</i>	0,048291	0,097969
<i>Observations</i>	7	6
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>df</i>	9	
<i>t Stat</i>	-0,45638	
<i>P(T<=t) one-tail</i>	0,329465	
<i>t Critical one-tail</i>	1,833113	
<i>P(T<=t) two-tail</i>	0,658929	
<i>t Critical two-tail</i>	2,262157	

Sumber: data diolah

Nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 0,4564 dengan nilai absolute dari t-hitung tersebut adalah 2,2262 dengan tingkat signifikansi 0,6589 dan akan dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan taraf $\alpha=0,05$ dan $df=9$.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t.hitung (0,4564) lebih kecil dari t tabel (2,2262). Dengan demikian, hipotesis H_0 yang menyatakan rata-rata beban pajak PT Duta Graha Indah Tbk sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah sama besar diterima atau dengan kata lain perubahan beban pajak sebelum dan sesudah pemberlakuan PP tersebut tidak terlalu signifikan.

4.1.2.4 Gabungan ADHI, DGIK, WIKA

Hasil uji beda dua rata-rata dengan t-test yang menggunakan Microsoft Excel 2003 terhadap data beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- Berikut adalah hasil uji F yang digunakan untuk melihat kesamaan varians sebelum mengambil keputusan uji hipotesis:

Tabel 4.7 Hasil Uji F atas rasio beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak Perusahaan Jasa Konstruksi sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009

	PP 40/2009	
	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	0,20964297	0,420994669
<i>Variance</i>	0,045655408	0,05867753
<i>Observations</i>	20	19
<i>df</i>	19	18
<i>F</i>	0,778073108	
<i>P(F<=f) one-tail</i>	0,295857901	
<i>F Critical one-tail</i>	0,546017204	

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 0,7781, sedangkan nilai F tabel untuk derajat bebas (19,18) dengan taraf alpha =0,1 adalah sebesar 0,5460.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu dengan perolehan F_{hitung} (0,7781) lebih besar dari F_{tabel} (0,5460). Dengan demikian asumsi kesamaan ragam untuk kedua kelompok (sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/3009) tidak dapat diterima.

2. Berikut adalah hasil uji beda dua rata-rata dengan varian berbeda untuk analisis rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak ADHI, DGIK, WIKA sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009:

Tabel 4.8 Hasil Uji T atas rasio beban pajak relatif terhadap laba sebelum pajak Perusahaan Jasa Konstruksi sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	0,20964297	0,420994669
<i>Variance</i>	0,045655408	0,05867753
<i>Observations</i>	20	19
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>df</i>	36	
<i>t Stat</i>	-2,883870025	
<i>P(T<=t) one-tail</i>	0,00329592	
<i>t Critical one-tail</i>	1,688297694	
<i>P(T<=t) two-tail</i>	0,00659184	
<i>t Critical two-tail</i>	2,028093987	

Sumber: data diolah

Nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 2,884 dengan nilai absolute dari t-hitung tersebut adalah 2,0280 dan akan dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan taraf $\alpha=0,05$ dan $df=36$.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah tolak H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t.hitung (2,884) lebih besar dari t tabel (2,0280). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara beban pajak perusahaan jasa konstruksi sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 yaitu beban pajak perusahaan jasa konstruksi yaitu DGIK, WIKA dan ADHI menjadi lebih besar setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009.

4.2. Analisis Pengaruh Laba Bersih Pajak Sebelum dan Setelah Berlakunya PP 51/2008 jo. PP 40/2009

4.2.1 Analisis deskriptif

Laba bersih perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian berfluktuasi dari yang terendah yaitu Rp. 1,785 Milyar diraih oleh ADHI pada periode triwulan I 2008 dan tertinggi juga diraih oleh ADHI dengan beban pajak sebesar Rp 101,378 Milyar pada periode triwulan IV 2009. Perusahaan Jasa Konstruksi yang memiliki laba bersih tertinggi adalah WIKA dengan rata-rata beban pajak sebesar Rp. 41,436 Milyar kemudian disusul oleh ADHI dan DGIK pada tempat kedua dan ketiga dengan rata-rata beban pajak sebesar dengan rata-rata beban pajak sebesar Rp. 27,894 Milyar dan Rp 16,783 Milyar berturut-turut.

Pada periode sebelum diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009, laba bersih DGIK mengalami peningkatan signifikan pada triwulan ketiga tahun 2007 dengan pergerakan dari Rp. 13,889 Milyar menjadi Rp. 22,417 Milyar. Peningkatan ini terus berlangsung sampai pada triwulan terakhir tahun 2007 menjadi Rp 29,880 Milyar. Laba bersih ini mengalami penurunan selama semester pertama tahun 2008 sebelum akhirnya naik lagi pada semester terakhir tahun 2008 dan menjadi sebesar Rp.17,929 Milyar pada triwulan terakhir tahun 2008 (periode setelah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009). Selama tahun 2009 sampai triwulan pertama tahun 2010, laba bersih DGIK bergerak stabil pada kisaran 12-21 milyar rupiah.

Adapun pola pergerakan laba bersih WIKA meningkat dengan sangat signifikan pada triwulan II tahun 2007 yaitu dari Rp. 6,558 Milyar menjadi Rp. 32,632 Milyar. Peningkatan laba bersih ini berlanjut pada triwulan terakhir tahun 2008 sebelum turun tajam pada triwulan I sampai III tahun 2008. Laba bersih sebelum diberlakukannya PP 51/2008 jo PPT 40/2009 bergerak pada kisaran Rp 6,558 Milyar dan Rp. 57,590 Milyar. Sedangkan kisaran beban pajak setelah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah sebesar Rp. 39,279 Milyar sampai Rp. 71,121 Milyar.

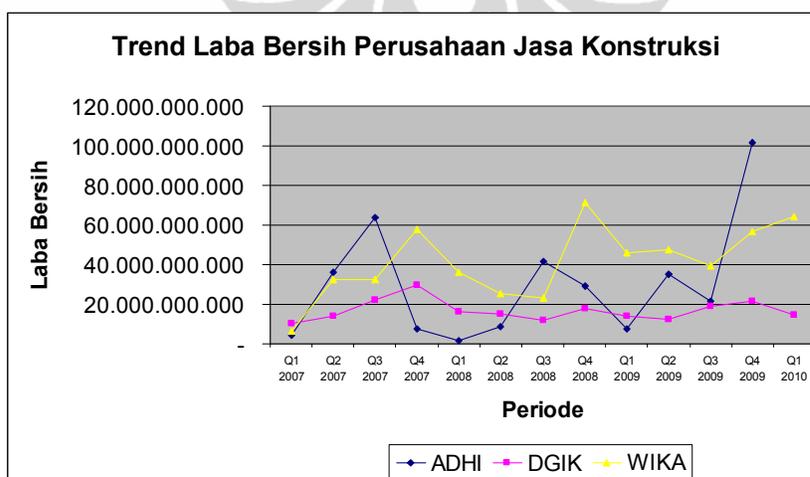
ADHI mengalami peningkatan laba bersih pada triwulan II dan III tahun 2007 dengan jumlah beban pajak sebesar Rp. 36,211 Milyar dan Rp. 63,606

Milyar, peningkatan ini tidak berlangsung lama dan turun drastis kembali pada triwulan terakhir tahun 2007 yaitu menjadi sebesar Rp 7,569 Milyar. Selama tahun 2008, laba bersih ADHI cenderung mengalami peningkatan dengan kisaran antara Rp. 1,785 Milyar sampai Rp. 63,606 Milyar pada triwulan III yaitu sebelum diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009. Sedangkan kisaran laba bersih setelah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah Rp. 4,011 Milyar sampai Rp. 101,378 Milyar

Dari pola pergerakan ketiga perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa setelah berlakunya PP 51/2008 jo. PP 40/2009, laba bersih perusahaan mengalami peningkatan. Dari gambar pola pergerakan laba bersih ketiga perusahaan jasa konstruksi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 memang mengakibatkan peningkatan laba bersih perusahaan.

Data laba bersih ADHI, WIKA dan DGIK yang berasal dari laporan keuangan triwulan perusahaan untuk triwulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 sampai dengan 31 Maret 2010 dapat dilihat pada lampiran 3. Gambar pergerakan laba bersih perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar pada BEI berdasarkan data laporan keuangan triwulan yang diunduh dari situs Bursa Efek Indonesia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2007 sampai dengan 31 Maret 2010 dapat dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.2: Trend Laba bersih Pada Perusahaan Jasa Konstruksi



Sumber : Laporan Keuangan Emiten Bursa Efek Indonesia

4.2.2 Analisis Regresi (Metode uji beda dua rata-rata /- t-test)

4.2.2.1 PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Hasil uji beda dua rata-rata dengan t-test yang menggunakan Microsoft Excel 2003 terhadap data laba bersih PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Berikut adalah hasil uji F yang digunakan untuk melihat kesamaan varians sebelum mengambil keputusan uji hipotesis:

Tabel 4.9 Hasil Uji F terhadap laba bersih PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. Pp 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	23394344993	33144127988
<i>Variance</i>	5,70569E+20	1,26254E+21
<i>Observations</i>	7	6
<i>df</i>	6	5
<i>F</i>	0,45192142	
<i>P(F<=f) one-tail</i>	0,180814646	
<i>F Critical one-tail</i>	0,321800884	

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 0,4519, sedangkan nilai F tabel untuk derajat bebas (6,5) dengan taraf alpha =0,1 adalah sebesar 0,3218.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu dengan perolehan F_{hitung} (0,4519) lebih besar dari F_{tabel} (0,3218). Dengan demikian asumsi kesamaan ragam untuk kedua kelompok (sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/3009) tidak dapat

diterima atau dengan kata lain laba bersih sebelum dan setelah penerapan PP tersebut memiliki varians yang berbeda.

- Berikut adalah hasil uji beda dua rata-rata dengan varian berbeda untuk analisis laba bersih PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009:

Tabel 4.10 Hasil Uji T terhadap laba bersih PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. Pp 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	2,3394E+10	3,3144E+10
<i>Variance</i>	5,7057E+20	1,2625E+21
<i>Observations</i>	7	6
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>df</i>	9	
<i>t Stat</i>	-0,570628	
<i>P(T<=t) one-tail</i>	0,29110823	
<i>t Critical one-tail</i>	1,83311292	
<i>P(T<=t) two-tail</i>	0,58221646	
<i>t Critical two-tail</i>	2,26215716	

Sumber: data diolah

Nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 0,5706 dengan nilai absolute dari t-hitung tersebut adalah 2,2622 dengan tingkat signifikan 0,5822 dan akan dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan taraf $\alpha=0,05$ dan $df=9$.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t.hitung (0,5706) lebih kecil dari t tabel (2,2622). Dengan demikian, hipotesis H_0 yang menyatakan rata-rata laba bersih PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah sama besar diterima karena penambahan laba bersih sebelum dan sesudah pemberlakuan PP tersebut tidak terlalu signifikan.

4.2.2.2 PT Duta Graha Indah Tbk

Hasil uji beda dua rata-rata dengan t-test yang menggunakan Microsoft Excel 2003 terhadap data laba bersih PT Duta Graha Indah Tbk adalah sebagai berikut:

- Berikut adalah hasil uji F yang digunakan untuk melihat kesamaan varians sebelum mengambil keputusan uji hipotesis:

Tabel 4.11 Hasil Uji F terhadap laba bersih PT Duta Graha Indah Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. Pp 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	1,7924E+10	1,5806E+10
<i>Variance</i>	5,0307E+19	1,3249E+19
<i>Observations</i>	6	7
<i>df</i>	5	6
<i>F</i>	3,79702824	
<i>P(F<=f) one-tail</i>	0,0675512	
<i>F Critical one-tail</i>	3,10751167	

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 3,7970, sedangkan nilai F tabel untuk derajat bebas (5,6) dengan taraf alpha =0,1 adalah sebesar 3,1075.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, yaitu dengan perolehan F_{hitung} (3,7970) lebih besar dari F_{tabel} (3,1075). Dengan demikian asumsi kesamaan ragam untuk kedua kelompok (sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/3009) tidak dapat diterima atau dengan kata lain laba bersih sebelum dan setelah penerapan PP memiliki varians yang berbeda.

2. Berikut adalah hasil uji beda dua rata-rata dengan varian berbeda untuk analisis laba bersih PT Duta Graha Indah Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009:

Tabel 4.12 Hasil Uji T terhadap laba bersih PT Duta Graha Indah Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. Pp 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	1,7924E+10	1,5806E+10
<i>Variance</i>	5,0307E+19	1,3249E+19
<i>Observations</i>	6	7
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>df</i>	7	
<i>t Stat</i>	0,66068469	
<i>P(T<=t) one-tail</i>	0,26497455	
<i>t Critical one-tail</i>	1,8945786	
<i>P(T<=t) two-tail</i>	0,5299491	
<i>t Critical two-tail</i>	2,36462425	

Sumber: data diolah

Nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 0,6607 dengan nilai absolute dari t-hitung tersebut adalah 2,3646 dengan tingkat signifikan 0,5299 dan akan dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan taraf $\alpha=0,05$ dan $df=7$.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t.hitung (0,6607) lebih kecil dari t tabel (2,3646). Dengan demikian, hipotesis H_0 yang menyatakan rata-rata laba bersih PT Duta Graha Indah Tbk sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah sama besar diterima karena penambahan laba bersih sebelum dan sesudah pemberlakuan PP tersebut tidak terlalu signifikan.

4.2.2.3 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Hasil uji beda dua rata-rata dengan t-test yang menggunakan Microsoft Excel 2003 terhadap data laba bersih PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

- Berikut adalah hasil uji F yang digunakan untuk melihat kesamaan varians sebelum mengambil keputusan uji hipotesis:

Tabel 4.13 Hasil Uji F terhadap laba bersih PT Wijaya Karya Persero Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. Pp 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	3,0579E+10	5,41E+10
<i>Variance</i>	2,3756E+20	1,461E+20
<i>Observations</i>	7	6
<i>df</i>	6	5
<i>F</i>	1,62554402	
<i>P(F<=f) one-tail</i>	0,30522888	
<i>F Critical one-tail</i>	3,40450659	

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 1,6255, sedangkan nilai F tabel untuk derajat bebas (6,5) dengan taraf alpha =0,1 adalah sebesar 3,4045.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 karena $F_{hitung} < F_{tabel}$, yaitu dengan perolehan F_{hitung} (1,6255) lebih kecil dari F_{tabel} (3,4045). Dengan demikian asumsi kesamaan ragam untuk kedua kelompok (sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/3009) dapat diterima atau dengan kata lain laba bersih sebelum dan setelah penerapan PP memiliki varians yang sama.

2. Berikut adalah hasil uji beda dua rata-rata dengan varian sama untuk analisis laba bersih PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009:

Tabel 4.14 Hasil Uji T terhadap laba bersih PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. Pp 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	3,0579E+10	5,41E+10
<i>Variance</i>	2,3756E+20	1,461E+20
<i>Observations</i>	7	6
<i>Pooled Variance</i>	1,96E+20	
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>df</i>	11	
<i>t Stat</i>	-3,0202853	
<i>P(T<=t) one-tail</i>	0,00582489	
<i>t Critical one-tail</i>	1,79588481	
<i>P(T<=t) two-tail</i>	0,01164977	
<i>t Critical two-tail</i>	2,20098516	

Sumber: data diolah

Nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar 3,0203 dengan nilai absolute dari t-hitung tersebut adalah 2,2009 dengan tingkat signifikan 0,0116 dan akan dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan taraf $\alpha=0,05$ dan $df=11$.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t.hitung (3,0203) lebih besar dari t tabel (2,200). Dengan demikian, hipotesis H_0 yang menyatakan rata-rata beban pajak PT Duta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah sama besar ditolak karena penambahan laba bersih sebelum dan sesudah pemberlakuan PP tersebut adalah signifikan.

4.2.2.4 Gabungan ADHI, DGIK, WIKA

Hasil uji beda dua rata-rata dengan t-test yang menggunakan Microsoft Excel 2003 terhadap data beban pajak tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Berikut adalah hasil uji F yang digunakan untuk melihat kesamaan varians sebelum mengambil keputusan uji hipotesis:

Tabel 4.15 Hasil Uji F terhadap laba bersih Perusahaan Jasa Konstruksi sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. Pp 40/2009

	Sebelum	Sesudah
<i>Mean</i>	2,43E+10	3,34E+10
<i>Variance</i>	2,96E+20	6,59E+20
<i>Observations</i>	20	19
<i>Df</i>	19	18
<i>F</i>	0,449319	
<i>P(F<=f) one-tail</i>	0,045965	
<i>F Critical one-tail</i>	0,546017	

Sumber: data diolah

Sebagaimana dapat dilihat pada table 4.3, nilai F-hitung sebesar 0,4493, sedangkan nilai F tabel untuk derajat bebas (19,18) dengan taraf alpha =0,1 adalah sebesar 0,5460.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan tolak H_0 jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 karena $F_{hitung} < F_{tabel}$, yaitu dengan perolehan F_{hitung} (0,4493) lebih kecil dari F_{tabel} (0,5490). Dengan demikian asumsi kesamaan varians untuk kedua kelompok (sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/3009) dapat diterima.

2. Berikut adalah hasil uji beda dua rata-rata dengan varian yang sama untuk analisis laba bersih ADHI, DGIK, WIKA sebelum dan sesudah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009:

Tabel 4.16 Hasil Uji T terhadap Laba Bersih Perusahaan Jasa Konstruksi sebelum dan setelah penerapan PP 51/2008 jo. Pp 40/2009

	Sebelum	Setelah
<i>Mean</i>	2,43E+10	3,34E+10
<i>Variance</i>	2,96E+20	6,59E+20
<i>Observations</i>	20	19
<i>Pooled Variance</i>	4,73E+20	
<i>Hypothesized Mean Difference</i>	0	
<i>Df</i>	37	
<i>t Stat</i>	-1,30764	
<i>P(T<=t) one-tail</i>	0,099531	
<i>t Critical one-tail</i>	1,687094	
<i>P(T<=t) two-tail</i>	0,199062	
<i>t Critical two-tail</i>	2,026192	

Sumber: data diolah

Nilai t hitung yang diperoleh adalah sebesar -1,3076 dengan nilai absolute dari t-hitung tersebut adalah 2,0262 dengan tingkat signifikan 0,1991 dan akan dibandingkan dengan nilai t-tabel dengan taraf $\alpha=0,05$ dan $df=37$.

Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menerima H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t.hitung (1,3076) lebih kecil dari t tabel (2,0262). Dengan demikian, hipotesis H_0 yang menyatakan rata-rata laba pajak sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 sama besar diterima dan menerima H_1 yang menyatakan rata-rata laba bersih sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 adalah berbeda harus ditolak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara laba bersih perusahaan jasa konstruksi sebelum dan sesudah diberlakukannya PP 51/2008 jo. PP 40/2009. Laba bersih perusahaan jasa konstruksi sebelum penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 lebih kecil dibandingkan setelah penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 yang ditandai dengan nilai t yaitu (-1,3076).

4.2.3 Analisis Faktor lain yang Mempengaruhi Laba Bersih Perusahaan Jasa Konstruksi

Beberapa faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan jasa konstruksi secara signifikan berdasarkan hasil analisis regresi dengan metode *stepwise* yang dilakukan dengan menggunakan tools SPSS 18 sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 4 untuk hasil analisis lengkap:

1. Beban Pajak
2. Pendapatan Bunga
3. Laba KSO (Kerjasama Operasi)

Dari hasil analisis regresi diketahui bahwa pengaruh ketiga faktor diatas terhadap laba bersih perusahaan adalah sebesar 73,5 % dan faktor-faktor lain seperti beban personalia, beban penyisihan piutang, laba/(rugi) selisih kurs dan lain-lain hanya mempengaruhi laba bersih perusahaan sebesar 26,5% yang tidak diteliti dalam karya akhir ini. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis terhadap masing-masing variabel diatas:

a. variabel beban pajak

Dari tabel koefisien yang diperoleh dari hasil pengolahan data program SPSS, diketahui bahwa t hitung adalah sebesar -3,362. T kritis pada signifikansi 0,025 (uji dua sisi) dengan derajat bebas sebesar 26 adalah 2,3788. Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t_{hitung} (-3,362) lebih besar dari t tabel (2,3788). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa beban pajak mempengaruhi laba bersih perusahaan usaha jasa konstruksi yang terdaftar pada BEI.

b. variabel pendapatan bunga

Dari tabel koefisien yang diperoleh dari hasil pengolahan data program SPSS, diketahui bahwa t hitung adalah sebesar 4,636. T kritis pada signifikansi 0,025 (uji dua sisi) dengan derajat bebas sebesar 26 adalah 2,3788. Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t.hitung (4,636) lebih besar dari t tabel (2,3788). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan bunga mempengaruhi laba bersih perusahaan usaha jasa konstruksi yang terdaftar pada BEI.

c. variabel laba KSO

Dari tabel koefisien yang diperoleh dari hasil pengolahan data program SPSS, diketahui bahwa t hitung adalah sebesar 3,328. T kritis pada signifikansi 0,025 (uji dua sisi) dengan derajat bebas sebesar 26 adalah 2,3788. Berdasarkan kriteria pengujian yaitu terima H_0 jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ dan tolak H_0 jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka keputusan yang diambil adalah menolak H_0 karena nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ yaitu dengan perolehan t.hitung (3,328) lebih besar dari t tabel (2,3788). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laba KSO mempengaruhi laba bersih perusahaan usaha jasa konstruksi yang terdaftar pada BEI.

Berikut adalah rumusan laba bersih berdasarkan hasil analisis regresi:

$$Y = 9,050,000,000 - 0,411 \text{ Beban Pajak} + 2,082 \text{ Pendapatan Bunga} + 0,842 \text{ Laba KSO}$$

Dari rumusan diatas, diketahui bahwa setiap penambahan beban pajak sebesar Rp 1 maka akan menurunkan laba bersih sebesar Rp 0,4111, sementara setiap pendapatan bunga sebesar Rp 1 akan menaikkan laba bersih sebesar Rp 2,082 dan setiap penambahan laba KSO sebesar Rp 1 akan menaikkan laba bersih sebesar Rp 0,842

Dengan demikian, beban pajak hanya salah satu faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan jasa konstruksi secara signifikan. Setelah berlakunya PP 51/2008 jo PP 40/2009, rata-rata beban pajak perusahaan lebih besar dari pada sebelum penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 namun peningkatan ini diimbangi dengan kenaikan pendapatan bunga dan laba KSO yang

diterima oleh perusahaan jasa konstruksi sehingga pada akhirnya laba bersih perusahaan tetap naik meskipun tidak terlalu signifikan.

Setiap proyek perusahaan tentu saja membutuhkan kucuran dana yang besarnya tergantung dari nilai proyek. Untuk membiayai proyek-proyek perusahaan baik proyek utama maupun proyek KSO, perusahaan jasa konstruksi harus dapat memastikan bahwa kas dan setara kas tersedia setiap saat dibutuhkan dalam proyek sehingga pekerjaan proyek dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhenti. Untuk mengatasi permasalahan dana tersebut, perusahaan jasa konstruksi menempatkan dananya dalam bentuk simpanan giro dan simpanan berjangka yang setiap saat dapat dicairkan bila diperlukan sewaktu-waktu.

Melalui penempatan dana dalam bentuk simpanan giro dan simpanan berjangka, perusahaan di satu sisi tidak perlu khawatir lagi akan permasalahan kesulitan dana cair dan di sisi lain juga bisa mendapatkan keuntungan dari pendapatan bunga apabila dana tersebut belum digunakan untuk membiayai proyek. Pendapatan bunga yang diterima oleh perusahaan jasa konstruksi ini memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perusahaan jasa konstruksi.

Dalam kerjasama operasi, perusahaan melakukan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut pada masing-masing perjanjian. Dalam perjanjian kerjasama, perusahaan harus menyerahkan dana kepada pengelola proyek sesuai kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerjasama menurut porsi yang ditetapkan. Dalam kerjasama proyek, tiap-tiap pihak yang bekerja sama akan menunjuk pengelola proyek dengan anggota yang berasal dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Pengelola proyek ini melaksanakan kegiatan pembangunan proyek yang berasal dari Pemberi Kerja (Owner) dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan dan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.

Beberapa perusahaan jasa konstruksi dapat bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu dalam sebuah kerjasama operasi. Melalui kerjasama tersebut, perusahaan jasa konstruksi dapat membatasi resiko bisnis yang mungkin muncul dari sebuah proyek seperti kegagalan pemilik proyek untuk membayar proyek yang telah diselesaikan, resiko harus menambal kenaikan biaya

yang mungkin terjadi pada saat proses konstruksi, kesulitan pendanaan bila harus membiayai keseluruhan proyek dan lain-lain.

Dalam suatu kerjasama operasi, resiko bisnis dibatasi hanya sebesar partisipasi perusahaan jasa konstruksi yang ditentukan dari besaran setoran dana pada kerjasama operasi. Oleh karena itu, semakin banyak perusahaan jasa konstruksi memilih untuk bergabung dalam kerjasama operasi karena mereka tetap bisa meraup keuntungan dari suatu proyek menggiurkan tanpa harus menanggung resiko sendiri.

4.3 Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Terhadap Perusahaan Jasa Konstruksi ditinjau dari prinsip Keadilan

Penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 tentu saja memberikan pengaruh terhadap perusahaan jasa konstruksi terutama pada masa transisi. Dampak pengenaan pajak penghasilan final terhadap perusahaan jasa konstruksi selama masa transisi dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut:

Suatu Kontrak Konstruksi mempunyai kontrak harga tetap sebesar Rp 9,000,000,000 untuk mendirikan sebuah jembatan. Jumlah pendapatan yang disetujui dalam kontrak adalah Rp. 9,000,000,000. Biaya kontrak menurut estimasi kontraktor semula adalah Rp 8,000,000,000 dan waktu yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek adalah 3 tahun dan akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2007. Pada akhir tahun ke-1, estimasi biaya kontrak meningkat menjadi Rp. 8,050,000,000. Dalam tahun ke-2, pemberi kerjanya menyetujui suatu penyimpangan yang menghasilkan peningkatan dalam pendapatan kontrak sebesar Rp 200,000,000 dan biaya kontrak tambahan yang diestimasi sebesar Rp. 150,000,000. Kontraktor tersebut menentukan tahap penyelesaian kontrak dengan perhitungan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan dilakukan sampai saat ini sampai estimasi total biaya kontrak yang terakhir. Rangkuman data keuangan selama periode konstruksi adalah sebagai berikut:

	2007	2008	2009
1. Pendapatan proyek yang disetujui	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
2. Penyimpangan Proyek		200.000.000	200.000.000
3. Total Pendapatan Proyek (1+2)	9.000.000.000	9.200.000.000	9.200.000.000
4. Biaya kontrak yang terjadi saat ini	2.093.000.000	6.068.000.000	8.200.000.000
5. Biaya kontrak untuk menyelesaikan	5.957.000.000	2.132.000.000	-
6. Total estimasi biaya kontrak (4+5)	8.050.000.000	8.200.000.000	8.200.000.000
7. Estimasi Laba (3-6)	950.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
8. Tahap penyelesaian (4:6)	26,00%	74,00%	100,00%

	Saat ini	Diakui pada Tahun Sebelumnya	Diakui pada Tahun Sekarang
Tahun 2007			
I. Pendapatan (3x7)	2.340.000.000	-	2.340.000.000
II. Beban (6x7)	2.093.000.000	-	2.093.000.000
III. Laba Usaha (I-II)	247.000.000	-	247.000.000
IV. Beban Usaha			110.000.000
V. Laba Sebelum Pajak (III-IV)			137.000.000
Tahun 2008			
I. Pendapatan (3x7)	6.808.000.000	2.340.000.000	4.468.000.000
II. Beban (6x7)	6.068.000.000	2.093.000.000	3.975.000.000
III. Laba Usaha (I-II)	740.000.000	247.000.000	493.000.000
IV. Beban Usaha			275.000.000
V. Laba Sebelum Pajak (III-IV)			218.000.000
Tahun 2009			
I. Pendapatan (3x7)	9.200.000.000	6.808.000.000	2.392.000.000
II. Beban (6x7)	8.200.000.000	6.068.000.000	2.132.000.000
III. Laba Usaha (I-II)	1.000.000.000	740.000.000	260.000.000
IV. Beban Usaha			125.000.000
V. Laba Sebelum Pajak (III-IV)			135.000.000

Pembayaran Kontrak:
 Uang Muka pada saat perjanjian kontrak ditandatangani

Termin I (tahun 2007)	20%
Termin II (tahun 2008)	25%
Termin III (tahun 2009)	25%

Retensi (tahun 2009) 5%
100%

PP 140/2000

PP 51/2008 jo. PP 40/2009

Pajak Penghasilan terutang:

2007	23.600.000	a	23.600.000	a
2008	47.900.000	b	47.900.000	b
2009	<u>37.800.000</u>	c	<u>82.800.000</u>	d
	109.300.000		154.300.000	

a) PPh Terutang: Tarif PPh Pasal 17 x DPP: Rp. 137.000.000 / (10% x Rp. 50.000.000) + (10% x Rp. 50.000.000) + (30% x Rp. 37.000.000)

b) PPh Terutang: Tarif PPh Pasal 17 x DPP: Rp. 218.000.000 / (10% x Rp. 50.000.000) + (10% x Rp. 50.000.000) + (30% x Rp. 118.000.000)

c) PPh Terutang: Tarif PPh Pasal 17 x DPP : Rp. 135.000.000 / (28% x Rp 135.000.000)

d) PPh Terutang: Tarif PPh Final Pasal 4 Ayat (2) x 30% x Rp. 2.392.000.000 / (3% x 30% x Rp 9.200.000.000)

Dari contoh perhitungan diatas, jelas dapat dilihat bahwa penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 mengakibatkan peningkatan beban pajak pada perusahaan jasa konstruksi karena yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam PPh final

adalah penghasilan bruto, sementara yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam PP 140/2000 adalah penghasilan neto (penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilan bruto per fiskal). Disamping itu, apabila atas proyek yang sama dikenakan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 dari awal proyek, maka total pajak yang terutang dari proyek tersebut adalah sebesar Rp 276.000.000 ($3\% \times \text{Rp } 9.200.000.000$). Dengan demikian, berlakunya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 mengakibatkan peningkatan beban pajak yang signifikan.

Berlakunya PP 51/2008 jo. PP 40/2009 berarti pemerintah menggunakan sistem pemajakan *schedular* untuk pemungutan Pajak Penghasilan dari perusahaan Jasa Konstruksi. Pemungutan pajak atas penghasilan yang bersumber dari usaha jasa konstruksi dipisahkan dari penghasilan perusahaan lainnya seperti penghasilan dari harta tidak bergerak, penghasilan dari kegiatan usaha lainnya dan lain-lain. Sebagaimana dapat dilihat pada pembahasan di bab 2, setiap sistem pemajakan baik global maupun *schedular* mempunyai kelemahan dan kekuatannya masing-masing.

Industri usaha jasa konstruksi merupakan salah satu industri yang cukup kompleks dan resiko untung atau rugi suatu proyek dapat berbeda-beda antara setiap proyek dan baru dapat diketahui pada saat proyek selesai dilaksanakan secara tuntas. Perlakuan akuntansi untuk industri ini pun diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Keuangan Nomor 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi. Pemungutan pajak dengan sistem *schedular* memang dapat mengatasi kerumitan yang disebabkan oleh perlakuan akuntansi untuk industri jasa konstruksi.

Pengaruh dari penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 terhadap perusahaan jasa konstruksi ditinjau dari prinsip keadilan adalah:

A. Masa Transisi

1. terdapat kemungkinan *double taxation* dan *double non-taxation* atas sebagian nilai proyek yang seharusnya menjadi objek pajak. Kondisi pengenaan pajak berganda dapat terjadi pada saat persentase penyelesaian proyek lebih besar dari persentase *progress billing* pada saat PP 51/2008 jo.

PP 40/2009 mulai berlaku. Sedangkan kondisi pajak tidak dikenakan atas sebagian nilai proyek terjadi pada saat persentase penyelesaian proyek lebih kecil daripada persentase *progress billing* (penagihan) pada saat PP 51/2008 jo. PP 40/2009 mulai berlaku yang dapat dilihat pada ilustrasi sebagai berikut:

Tabel 4.17 Pengenaan *double taxation* dan *double non-taxation* atas nilai proyek pada masa transisi

Pembayaran Kontrak		Tahun Pajak	Obyek Pajak	Tahun Pajak		Obyek Pajak
			Persentase Penyelesaian Proyek < Persentase Pembayaran Kontrak			Persentase Penyelesaian Proyek > Persentase Pembayaran Kontrak
Uang Muka	20%	2007	2.340.000.000	2007	20%	2.340.000.000
Termin I (tahun 2007)	30%				25%	
Termin II (tahun 2008)	30%	2008	4.468.000.000	2008	25%	4.468.000.000
Termin III + Retensi (tahun 2009)	20%	2009	1.840.000.000	2009	30%	2.760.000.000
Total			8.648.000.000			9.568.000.000

Sumber : diolah

Dari contoh perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pada saat persentase penyelesaian proyek lebih kecil dari persentase *progress billing*, maka nilai proyek yang menjadi obyek pajak hanyalah sebesar Rp 8,648,000,000 dan nilai proyek sebesar Rp 552,000,000 tidak pernah diperhitungkan sebagai obyek pajak dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan jasa konstruksi. Namun dipihak lain, pada saat persentase penyelesaian proyek lebih besar dari persentase *progress billing*, maka terdapat kelebihan pengakuan nilai proyek sebagai obyek pajak yaitu sebesar Rp. 568,000,000.

Pengenaan pajak berganda atau tidak dikenakannya pajak atas suatu obyek pajak tertentu jelas menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pemungutan pajak.

Universitas Indonesia

2. Wajib Pajak tidak lagi diperkenankan untuk mengkompensasi kerugian yang pernah dialami perusahaan sesuai dengan periode yang diperkenankan berdasarkan UU PPh. Kompensasi kerugian hanya diperkenankan sampai tahun pajak 2008. Tentu saja hal ini sangatlah merugikan Wajib Pajak yang sebelumnya mempunyai hak untuk mengkompensasi kerugian yang mereka pernah alami pada tahun-tahun pajak sebelumnya.

B. Setelah Masa Transisi

1. Keadilan Horizontal

- a. Keadilan horizontal menghitung pajak penghasilan atas dasar prinsip *globality*. Sementara, sistem pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi berdasarkan PP 51/2008 jo PP 40/2009 tidak memenuhi syarat prinsip *globality* karena pemungutan PPh Final atas penghasilan usaha jasa konstruksi menggunakan sistem pemungutan yang bersifat *schedular* (dipisahkan dari sumber pajak penghasilan yang lain).
- b. Keadilan horizontal menghitung pajak penghasilan atas laba bersih (*ability to pay*). Sementara, sistem pajak penghasilan atas transaksi usaha jasa konstruksi berdasarkan PP 51/2008 jo PP 40/2009 menggunakan sistem *withholding* dengan dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto sebelum PPN.

Kemampuan seorang Wajib Pajak dalam membayar pajak sendiri tercermin dalam penghasilan netto yaitu penghasilan setelah dikurangi dengan biaya/pengurang yang diperkenankan dengan undang-undang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU PPh. Disamping itu, terdapat juga pengurangan yang diperkenankan dalam menghitung penghasilan kena pajak antara lain: kompensasi kerugian, PTKP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam PP 51/2008 jo PP 40/2009 dasar untuk menghitung pajak atas penghasilan/imbalan yang diterima oleh perusahaan jasa konstruksi adalah penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Sangatlah mungkin terjadi biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto

lebih besar dari penghasilan bruto atau dengan kata lain perusahaan menderita kerugian (penurunan kemampuan ekonomis).

Perusahaan harus tetap membayar PPh yang terutang tanpa memandang kinerja keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu yaitu apakah perusahaan sedang mengalami keuntungan atau menderita kerugian dalam pengenaan pajak final.

Dengan demikian penerapan PP 51/2008 jo. PP 40/2009 jelas tidak mencerminkan prinsip *ability to pay*. Chaerul dalam penelitian karya akhirnya yang hampir serupa yaitu Aspek PPh pada Sektor Jasa Konstruksi Tinjauan untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan juga menyatakan bahwa pengenaan PPh Final tersebut menjadi sama dengan penetapan penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan dimana ketentuan tersebut membuat ketentuan pasal 6 dan pasal 9 undang –undang pajak penghasilan menjadi diabaikan dan pengenaan pajak final tersebut tidak memenuhi azas keadilan berdasarkan *ability to pay principle*.

- c. Keadilan horizontal memegang prinsip *equal treatment for the equals*. Sistem pajak penghasilan atas transaksi jasa konstruksi menggunakan tarif tunggal yang tidak memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Seluruh transaksi jasa konstruksi dikenakan PPh Final tanpa melihat apakah transaksi tersebut memang memberikan keuntungan atau malah merugikan Wajib Pajak.

2. Keadilan Vertikal

Pengenaan PPh Final juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan vertikal yaitu *progression* karena seluruh perusahaan jasa konstruksi baik perusahaan jasa konstruksi yang dapat bekerja dengan efisien sehingga memperoleh laba yang jauh dan perusahaan jasa konstruksi yang masih belum efisien sehingga hanya dapat memperoleh laba rendah, tetap dikenakan pajak yang sama. Sistem pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi menggunakan tarif tunggal tanpa melihat tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak yang berarti setiap Wajib Pajak dengan penghasilan yang besar, sedang atau rugi sekalipun dikenakan pajak dengan tarif yang sama.

3. Diskriminasi tarif.

Dalam PPh Final berlaku tarif khusus yang hanya berlaku untuk penghasilan tertentu saja, atau dengan kata lain terdapat perbedaan tarif PPh final yang berlaku untuk satu jenis penghasilan tertentu dibandingkan dengan tarif jenis penghasilan tertentu lainnya dan jelas terdapat perbedaan tarif dengan tarif umum Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Penentuan tarif flat merupakan salah satu prasyarat agar suatu sistem pemungutan pajak *schedular* dapat memenuhi prinsip pemajakan yang baik.

Penentuan suatu tarif flat yang tepat dapat ditentukan berdasarkan rata-rata operating profit margin perusahaan jasa konstruksi. Margin tersebut kemudian dikalikan dengan tarif umum sesuai dengan tarif PPh Pasal 17 yaitu sebesar 25% untuk mencegah terjadinya diskriminasi tarif. Rata-rata operating profit margin ketiga perusahaan yang terdaftar di bursa tersebut adalah sebesar 6,68% sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 5. Berdasarkan uji rata-rata yang dilakukan, operating profit margin usaha jasa konstruksi berada pada kisaran 6%-7,40%. Dengan demikian, tarif pajak flat yang tepat untuk penghasilan yang berasal dari pelaksanaan usaha jasa konstruksi adalah berkisar antara 1,5-1,85% dari nilai proyek sebelum PPN.